

NAMA UNIT KERJA :
TAHUN EVALUASI :

PENILAIAN		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Keterangan
MANAJEMEN PERUBAHAN (8)		8.0		7.06	88.25%	
1	Tim Kerja (1)	1.0		1.00	100.00%	
	a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas?	Y/T	Ya	1		Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.
	b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas?	A/B/C	A	1		a. Jika dengan prosedur/mechanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja; b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja; c. Jika tidak di seleksi.
2	Rencana Pembangunan Zona Integritas (2)	2.0		1.50	75.00%	
	a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?	Y/T	Ya	1		Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.
	b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?	A/B/C	A	1		a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.
	c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM?	A/B/C	B	0.5		a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala; b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala; c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan.
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)	2.0		1.56	78.00%	
	a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana?	A/B/C/D	B	0.67		a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana.
	b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas?	A/B/C/D	A	1		a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala; b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala; c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala; d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas.
	c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti?	A/B/C/D	B	0.67		a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti.
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja (3)	3.0		3.00	100.00%	
	a. Apakah pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM?	Y/T	Ya	1		ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.
	b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan?	A/B/C	A	1		a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya; b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya; c. Jika belum terdapat agen perubahan.
	c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?	A/B/C	A	1		a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan; b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan; c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir.

Dokumen Pendukung
SK Direktur Poltekpar Makassar tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Poltekpar Makassar
Rapat-rapat pemilihan & penetapan anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Poltekpar Makassar
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Poltekpar Makassar
Website, Media sosial
Sebagian besar target yang direncanakan terhadap 6 area bidang perubahan sudah dilaksanakan dengan baik
Tim menyusun Laporan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas per bulan tahun 2020
Laporan Tindak Lanjut hasil Monev
Pimpinan menjadi Role Model untuk pegawai di lingkungan Poltekpar Makassar
Surat Keputusan Direktur Poltekpar Makassar tentang Agen Perubahan
Internalisasi Budaya Kerja (Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong)

	d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?		A/B/C/D	A	1		a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan /motto, banner, poster dll) dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan /motto banner, poster dll); c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan /motto banner, poster dll); d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	Sudah dilakukan Sosialisasi tentang Revolusi Mental dan sudah menandatangani Pakta Integritas
PENATAAN TATALAKSANA (7)		7.0				6.11	87.33%	
1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (2)		2.0				1.61	80.67%	
	a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi?		A/B/C/D	B	0.67		a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis.	SOP tentang Proses Bisnis Poltekpar Makassar
	b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan?		A/B/C/D/E	B	0.75		a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi; e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi.	Semua SOP diterapkan di lingkungan Poltekpar Makassar
	c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi?		A/B/C/D/E	A	1		a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP; b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP; c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi; e. Jika SOP belum pernah dievaluasi.	Pelaksanaan rapat-rapat untuk Inovasi, SOP tentang Proses Bisnis Poltekpar Makassar
2 E-Office (4)		4.0				4.00	100.00%	
	a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	A	1		a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance / e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance / e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi; c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance / e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi.	e-Performance, SIMPEG, inovasi pengukuran kepuasan publik melalui Hallo Wonderful
	b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	A	1		a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM.	Simpeg dan e-Performance
	c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	A	1		a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi; b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi.	Web site, Smart Office, Data center
	d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?		A/B/C	A	1		a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala; c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.	Laporan bulanan Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
3 Keterbukaan Informasi Publik (1)		1.0				0.50	50.00%	

	a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan?		A/B/C	B	0.5		a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap; b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap; c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik.	SK Direktur Poltekpar Makassar tentang PPID sesuai dengan Permenpar tentang Keterbukaan Informasi Publik
	b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik?		A/B/C	B	0.5		a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti; b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti; c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan.	Laporan Monev bulanan Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)		10.0			8.87	88.70%		
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (0,5)	0.5			0.45	89.00%		
	a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?		Y/T	Ya	1		Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.	SK Direktur Poltekpar tentang Anjab dan ABK
	b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?		A/B/C/D	B	0.67		a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.	Sudah disesuaikan dengan kebutuhan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta peta jabatan
	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?		Y/T	Ya	1		Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.	Sudah melakukan monitoring evaluasi terhadap penempatan pegawai melalui rapat update penempatan pegawai dan peta jabatan
2	Pola Mutasi Internal (1)	1.0			1.00	100.00%		
	a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?		Y/T	Ya	1		Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.	Dokumen tentang Mutasi Pegawai dilingkungan Poltekpar Makassar
	b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?		A/B/C/D/E	A	1		a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini; b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi.	Masing-masing pegawai sudah menempati sesuai dengan SK jabatan masing2 di lingkungan Poltekpar Makassar
	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?		Y/T	Ya	1		Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.	Dokumen pelaksanaan monev terhadap kegiatan mutasi pegawai dengan pertimbangan perbaikan kinerja
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (2,5)	2.5			2.50	100.00%		
	a. Apakah Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi?		Y/T	Ya	1		Ya, jika sudah dilakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi.	Dokumen perencanaan kebutuhan diklat pengembangan kompetensi
	b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?		A/B/C/D	A	1		a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.	Dokumen rapat-rapat untuk menyusun perencanaan kebutuhan diklat pengembangan kompetensi

	c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan?		A/B/C/D	A	1		a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%; b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50%; c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%; d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%.	tingkat kesenjangan yang ada standard kompetensi dibawah 25%, hal ini dapat dibuktikan dengan data Simpeg dan Analisis Jabatan
	d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya?		A/B/C/D	A	1		a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	Seluruh pegawai memperoleh kesempatan yang sama untuk diklat maupun pengembangan kompetensi sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing
	e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)?		A/B/C/D	A	1		a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai; b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai; c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai; d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai.	Sudah ada upaya pengembangan kompetensi pegawai melalui keikutsertaan pada lembaga diklat, baik didalam dan di luar negeri
	f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?		A/B/C	A	1		a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala; b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala; c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan.	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan
4	Penetapan kinerja individu (4)	4.0			3.67	91.75%		
	a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi?		A/B/C/D	A	1		a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP); b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi; c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi; d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi.	Sebagian besar Penetapan Kinerja Individu telah disusun untuk seluruh pegawai
	b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya?		A/B/C/D	B	0.67		a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya serta menggambarkan <i>logic model</i> ; b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya; c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya; d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya.	Sebagian besar Penetapan Kinerja Individu telah memiliki kesesuaian dengan Indikator Kinerja level di atasnya
	c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik?		A/B/C/D/E	A	1		a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan; b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan; c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran; d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan; e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan.	Pengukuran Kinerja individu dilakukan secara triwulanan
	d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)?		Y/T	Ya	1		Ya, jika hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).	Hasil Penilaian Kinerja Individu telah diberikan reward melalui Promosi jabatan dll).
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1,5)	1.5			1.01	67.00%		

	a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?		A/B/C/D	B	0.67		a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi.	Telah menerapkan kode etik pegawai serta melaksanakan inovasi dalam lingkungan kerja, sarana kerja, perilaku kerja dan menerapkan konsep Go-digital
6. Sistem Informasi Kepegawaian (0,5)		0.5			0.25	50.00%		
	a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala?		A/B/C	B	0.5		a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai; b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala; c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan.	Pegawai telah memperbaharui data pegawai setiap bulan
PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)		10.0			9.17	91.67%		
1 Keterlibatan pimpinan (5)		5.0			4.17	83.33%		
	a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan?		A/B/C	A	1		a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan; b. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan; c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan.	Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan rencana kerja
	b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja?		A/B/C	B	0.5		a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja; b. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja; c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja.	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan SKP Pegawai
	c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala?		A/B/C/D	A	1		a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan; b. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan; c. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja; d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam memantau pencapaian kinerja.	Pimpinan memantau kinerja secara langsung secara berkala mingguan melalui Top 3
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)		5.0			5.00	100.00%		
	a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada?		Y/T	Ya	1		ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan lengkap.	telah memiliki Dokumen Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja
	b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?		Y/T	Ya	1		ya, jika perencanaan telah berorientasi hasil.	Sudah menerapkan penilaian Kinerja berbasis aplikasi e-Performance
	c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)?		Y/T	Ya	1		ya, jika unit kerja memiliki IKU.	Sudah ditetapkan berdasarkan IKU Kementerian
	d. Apakah indikator kinerja telah SMART?		A/B/C/D	A	1		a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART; c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART; d. Jika belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART.	Indikator Kinerja Berbasis balance score card
	e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu?		Y/T	Ya	1		Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.	Laporan Kinerja disusun setiap triwulan pada Aplikasi e-Performance
	f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja?		A/B/C	A	1		a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja; c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja.	LAKIP Poltepar Makassar
	g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja?		Y/T	Ya	1		ya, jika terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.	Sudah dilaksanakan Upaya peningkatan seluruh SDM yang menangani AKIP
	h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten?		A/B/C	A	1		a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten; b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten; c. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten.	Sudah dilaksanakan Diklat sesuai dengan Kompetensi dan Bidang SDM
PENGUATAN PENGAWASAN (15)		15.0			14.50	96.68%		
1 Pengendalian Gratifikasi (3)		3.0			2.25	75.00%		
	a. Apakah telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi?		A/B/C	B	0.5		a. Jika <i>public campaign</i> telah dilakukan secara berkala; b. Jika <i>public campaign</i> dilakukan tidak secara berkala; c. Jika belum dilakukan <i>public campaign</i> .	Dokumen sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Poltepar Makassar

	b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan?		A/B/C/D	A	1	2	a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur; b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan; c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian; d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi.	Pengendalian Gratifikasi diimplementasikan melalui whatsapp group Poltekpar Makassar
2	Penerapan SPIP (3)	3.0			2.63	87.50%		
	a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian?		A/B/C/D/E	B	0.75		a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian.	Dokumen RTP Poltekpar Makassar yang didalamnya memuat Inovasi Pelayanan Publik dan Pengendalian Resiko mengenai Kegiatan Poltekpar Makassar
	b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan?		A/B/C/D/E	B	0.75		a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian risiko.	Dokumen RTP Poltekpar Makassar yang didalamnya memuat Inovasi Pelayanan Publik dan Pengendalian Resiko mengenai Pelayanan Poltekpar Makassar
	c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi?		A/B/C	A	1		a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko.	Dokumen RTP Poltekpar Makassar yang didalamnya memuat Inovasi Pelayanan Publik dan Pengendalian Resiko mengenai Pelayanan Poltekpar Makassar
	d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait?		A/B/C	A	1		a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait; b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait; c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait.	Sosialisasi SPI di lingkungan Poltekpar Makassar
3	Pengaduan Masyarakat (3)	3.0			5.25	175.00%		
	a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan?		A/B/C	B	0.5		a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.	We site Poltekpar Makassar layanan informasi dan Rubrik Poltekpar Makassar
	b. Penanganan Pengaduan Masyarakat		%	66.67%	0.67		Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan.	Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat
	a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti		Jumlah	3				
	b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses		Jumlah	1				
	c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti		Jumlah	2				
	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat?		A/B/C	A	1		a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala; b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala; c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi.	Laporan Monev bulanan Pengaduan Masyarakat

	d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti?		A/B/C	A	1		a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti.	Laporan tindak lanjut atas hasil monev Penanganan Pengaduan Masyarakat
4	Whistle-Blowing System (3)	3.0			1.88	62.50%		
	a. Apakah <i>Whistle Blowing System</i> sudah di internalisasi?		Y/T	Ya	1		Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja.	Sosialisasi Whistle Blowing System di lingkungan Poltekipar Makassar
	b. Apakah <i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan?		A/B/C	B	0.5		a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System.	WBS telah diterapkan dan diimplementasikan di lingkungan Poltekipar Makassar dan disosialisasikan melalui Kanal Digital Resmi Poltekipar Makassar (media sosial, video tron, digital banner, digital poster, running text)
	c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> ?		A/B/C	B	0.5		a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala; b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala; c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan evaluasi.	Laporan monitoring dan evaluasi bulanan atas penerapan Whistle Blowing System
	d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti?		A/B/C	B	0.5		a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti.	Laporan hasil tindak lanjut atas penerapan WBS
5	Penanganan Benturan Kepentingan (3)	3.0			2.50	83.40%		
	a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama?		A/B/C/D	B	0.67		a. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama; b. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama; c. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama; d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.	Dokumen Identifikasi benturan kepentingan di lingkungan Poltekipar Makassar
	b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi?		A/B/C/D	A	1		a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/ diinternalisasikan ke seluruh layanan; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/ diinternalisasikan ke sebagian besar layanan; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/ diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan; d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan/ diinternalisasikan ke seluruh layanan.	Laporan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Poltekipar Makassar
	c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan?		A/B/C/D	A	1		a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil layanan; d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh layanan.	Laporan monev Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Poltekipar Makassar
	d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan?		A/B/C	A	1		a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala oleh unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja.	Penanganan Benturan Kepentingan telah dilakukan evaluasi secara berkala
	e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti?		A/B/C	B	0.5		a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja.	Laporan tindak lanjut hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Poltekipar Makassar
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)		10.0			9.60	96.00%		
1	Standar Pelayanan (3)	3.0			3.00	100.00%		

	a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan?		A/B/C	A	1		a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan.	Keputusan Direktur Poltekpar Makassar tentang Standar Pelayanan Poltekpar Makassar
	b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumkan?		A/B/C/D/E	A	1		a. Jika unit kerja memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja memaklumkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja telah memaklumkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; e. Jika belum terdapat standar pelayanan yang telah dimaklumkan.	Maklumat standar pelayanan Poltekpar Makassar
	c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan?		A/B/C/D/E	A	1		a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; e. Jika unit kerja belum mempunyai SOP tentang pelaksanaan standar pelayanan.	SOP di lingkungan Poltekpar Makassar
	d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP?		A/B/C	A	1		a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP; b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.	Dokumen Laporan Reviu dan Perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
2	Budaya Pelayanan Prima (3)	4.0			3.60	90.00%		
	a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima?		A/B/C/D	A	1		a. Jika sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada seluruh pegawai yang memberikan pelayanan; b. Jika sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada sebagian besar pegawai yang memberikan pelayanan; c. Jika sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada sebagian kecil pegawai yang memberikan pelayanan; d. Jika belum terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima.	Laporan kegiatan sosialisasi dan standarisasi Pelayanan Publik
	b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media?		A/B/C	A	1		a. Jika informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb); b. Jika informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb); c. Jika informasi pelayanan belum dapat diakses melalui berbagai media.	Pelayanan Publik mudah diakses pada media sosial, video tron, digital poster, digital banner, web site Poltekpar Makassar
	c. Apakah telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?		A/B/C	B	0.5		a. Jika telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan; b. Jika telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan; c. Jika belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.	Punishment/Reward tercantum dalam Keputusan Direktur tentang Standar Pelayanan

	d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi?		A/B/C/D	A	1		a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi; b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi; c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi; d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/terintegrasi.
	e. Apakah terdapat inovasi pelayanan?		A/B/C/D/E	A	1		a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat; c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan.
3	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)	3.0			3.00	100.00%	
	a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan?		A/B/C	A	1		a. Jika survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala; b. Jika survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala; c. Jika belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
	b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka?		A/B/C	A	1		a. Jika hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb); b. Jika hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb); c. Jika hasil survei kepuasan masyarakat belum dapat diakses melalui berbagai media.
	c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat?		A/B/C/D	A	1		a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat; b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat; c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat; d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.
TOTAL PENGUNGKIT		60.0			55.31		
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)							
	1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15.0	0-4	4	15.00	100.00%	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi
	2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5.0	0-100%	100.00%	5.00	100.00%	
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)							
	1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)	20.0	0-4	4	20.00	100.00%	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan
TOTAL HASIL		40.0			40.00	100.00%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					95.31		

<p>Terdapat Sarana Layanan Terpadu berupa Information Center, Smart Office dan Siakad</p>
<p>Unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain</p>
<p>Laporan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala</p>
<p>Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat diakses melalui web site Poltekpar Makassar</p>
<p>Laporan tindak lanjut analisis dan rekomendasi penilaian hasil survey kepuasan masyarakat</p>